e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

PERANAN MOKOLE MBEOGA DI KERAJAAN WAWONII :1650-1745

Oleh:
Siti Sulfiani
Aswati M.
Hamuni
(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo)

Abstract

This study aims to describe: (1) government structure of the Wamonii Kingdom, (2) Background of the Mbeoga's appointment as Mokole in the Wawonii Kongdom, (3) the development of the Wawonii Kingdom during the Mokole Mbeoga government. The method used in this study was the historical method which devided into five stages, namely: (1) topic selection. (2) source collection, (3) source verification, (4) source interpretation and (5) historiography. The result showed that: (1) the government structure of the Wawonii Kingdom had been compiled during the previous Mokole government, namely Mokole/Lakino Lamboi consisted of Lakino (Mokole), the Village Head, Kapita and Bonto. The king ini running the government was assisted by his apparatus. During the Mbeoga period a number of improvements were made. The Wawonii royal government structure consisted of the King, Tamalaki, Kapita, Bonto, Head of household affairs, laborers and shamans, (2) the background of Mbeoga's appointment as Mokole was based on on the lineage of his father named Mokole Maulu. Mbeoga's appointment as Mokole was due to his charisma as a leader. In addition, Mbeoga as a soldier had followed his father during the war against the Tobelo pirates in Wawonii Island at the age of 25, (3) the Wawonii Kongdom during the reign of Mokole Mbeoga could be seen in the fields of: (a) politics and governace, (b) economy improvement, (c) defense, (d) development of Islam and (e) socio-culture.

Keywords: Kongdom of Wawonii, Governance, Islam, Development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Struktur Pemerintahan Kerajaan Wawonii, (2) Latar belakang pengangkatan Mbeoga sebagai Mokole di Kerajaan Wawonii, (3) Perkembangan Kerajaan Wawonii pada masa Pemerintahan Mokole Mbeoga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terbagi lima tahap yaitu: (1) Pemilihan Topik, (2) Pengumpulan Sumber,(3) Verifikasi Sumber, (4) Interpretasi Sumber, dan (5) Historiografi. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa: (1) Struktur pemerintahan Kerajaan Wawonii telah disusun pada masa pemerintahan Mokole sebelumnya yakni Mokole/Lakino Lamboi yang terdiri dari Lakino (Mokole), Kepala Kampung, Kapita dan Bonto. Raja dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh perangkatnya. Pada masa Mbeoga dilakukan sejumlah perbaikan. Adapun susunan pemerintahan kerajaan Wawonii terdiri dari : Raja, Tamalaki, Kapita, Bonto, kepala urusan rumah tangga, buruh dan dukun. (2) latar belakang pengangkatan Mbeoga sebagai Mokole berdasarkan garis keturunan dari ayahnya yang bernama Mokole Maulu. Pengangkatan Mbeoga sebagai Mokole karena memiliki kharisma sebagai seorang pemimpin. Di samping itu Mbeoga sebagai seorang prajurit sudah mengikuti ayahnya ketika perang melawan bajak laut Tobelo di perairan Wawonii pada usia 25 tahun, (3) Kerajaan Wawonii pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga dapat dilihat dalam bidang : (1) Politik dan pemerintahan, (2) perbaikan ekonomi, (3) Pertahanan,(4) Perkembangan agama Islam, dan (5) Sosial budaya.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Kata Kunci: Kerajaan, pemerintahan, perkembangan, Islam

1. PENDAHULUAN

Di masa pemerintahan Mokole Mbeoga, Kerajaan Wawonii mengalami perkembangan. Pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga agama Islam juga mengalami perkembangan di mana pihak kerajaan membangun masjid yang bernama *Allahu Akbar* pada tahun 1650. Di masa tersebut, Mokole Mbeoga juga mengumumkan bahwa tidak ada lagi perang dengan Tobelo dan keadaan pulau Wawonii dinyatakan aman. Di masa pemerintahannya, Mokole Mbeoga dikenal memiliki peranan yang kuat.

Istilah peranan dapat diartikan sebagai serangkaian aksi-aksi yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang diberi tugas dan kekuatan untuk menjadi "bapak masyarakat". Peranan juga lebih cenderung dimaknai sebagai suatu perilaku seseorang dalam suatu kegiatan atau aktivitas tertentu.Untuk itu peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, sebab perananlah yang menjadi aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang yang apabila melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Atas dasar itu, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan ialah perilaku yang di harapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.Peranan-peranan yang dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh individu (Cohen, 1983:82).

Dengan demikian, peran adalah suatu pola tindakan sebagai suatu respon yang ditampilkan oleh seseorang atau sekelompok orang, di mana tindakan ini membawa suatu efek atau dampak.Senada dengan itu, Koentjaraningrat dalam Saragih (1990:172) menyatakan bahwa peran adalah ciri khas yang ditampilkan atau dipentaskan oleh individual dalam kedudukannya. Selanjutnya peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu perilaku.

Status ialah kedudukan sosial individu dalam suatu kelompok atau biasa juga diartikan sebagai suatu tingkat sosial dari suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Kedudukan status individu dapat dilihat pada keberadaan Mokole Mbeoga di Kerajaan Wawonii. Sebagai mokole, ia mempunyai peranan penting dalam meningkatkan sistem keamanan di Kerajaan Wawonii, baik dalam bidang ekonomi, agama, maupun dalam bidang sosial budaya.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai perkembangan suatu negara atau kerajaan maka perlu dilihat berbagai teori mengenai kerajaan yang di kemukakan oleh para ahli. Menurut Jean Bodin bahwa "Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat" (C.S.T. Kansil, 1991: 21). Dengan demikian negara merupakan suatu persekutuan manusia yang dilengkapi dengan berbagai keperluan seperti pemerintahan atau kekuasaan .Terjadinya sebuah negara harus ada unsur-unsur dan syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki. Adapun unsur-unsur dan syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara menurut *Oppenheim Lauterbacht* ada tiga, yaitu sebagai berikut :"1) Harus ada rakyat, 2) Harus ada wilyah, 3) Harus ada pemerintahan yang berdaulat" (Lubis, 1981: 10). Apabila salah satu dari ketiga unsur atau syarat tersebut tidak dimiliki maka suatu kelompok masyarakat tersebut belum dapat dikatakan sebuah negara.

Penelitian ini juga dapat dilihat dari konsep elite. Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik (Keller 1995: 28). Jika mengacu pada elite lokal maka ia dapat didefenisikan sebagai invidu yang memegang peran penting dalam keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal. Keller berpendapat bahwa konsep

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

mengenai elite yaitu: pertama, elite menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kedua, elite sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya. Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama.Elite tidak seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan barat. Kuasa elite tersebut berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Elite tradisional termasuk pemimpin agama, golongan elite tradisional, tuan tanah, dan orang-orang dari kawasan yang telah diberi hak oleh pemerintah kolonial. Seorang elite dapat menganggotai beberapa kategori tersebut misalnya seorang anak raja.

Keller mengungkapkan bahwa elite yang berpengaruh dalam kondisi masyarakat modern dan dalam nuansa heterogonitas disebut elite strategis.Dalam kondisi modern, elite strategis dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni di berbagai segmen. Dalam penelitian ini, elite tradisional dianggap sebagai elite strategis sebagai orang yang memiliki kemampuan berkuasa lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain sehingga memiliki dampak penghormatan yang berlebih dari pengikutnya.

Berkaitan dengan penelitian ini terdapat pula konsep pemerintahan. Menurut P.J. Bouman (1965: 38) bahwa "pemerintahan itu adalah kekuasaan yang diakui mengenai perhubungan yang lengkap antara mereka yang memerintah dan mereka yang tunduk kepada bantuan alat-alat pemerintahan". Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintahan dapat diartikan sebagai perbuatan atau cara untuk urusan memerintah, antara lain misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokrasi, dan pemerintahan diktator. Dalam istilah bahasa Inggris lebih dikenal dengan "*gomernment"* yang mengandung arti sebagai berikut : (1) melaksanakan wewenang pemerintah, (2) cara atau sistem pemerintah, (3) fungsi atau kekuasaan pemerintah, dan (4) badan yang terdiri atas orang-orang yang melaksanakan wewenang atau hukum dalam suatu negara.

Penelitian mengenai peranan Mokole Mbeoga di Kerajaan Wawonii ini dilaksanakan di Desa Ladianta Kecamatan Wawonii Timur Laut. Dengan pertimbangan terdapat bukti-bukti sejarah keberadaan Kerajaan Wawonii berupa benteng dan sisa-sisa peninggalan lainnya. Penelusuran sumber juga dilakukan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perpustakaan FKIP UHO, dan Perpustakaan Universitas Halu Oleo.Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juli 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Sejarah Politik. Sifat penelitian adalah analitis-kritis, yakni suatu jenis penelitian di mana peneliti berusaha mendeskripsikan fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari data-data yang diteliti di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturis, dengan mengacu pada pendapat Leirissa (1996: 12) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga domain dalam penelitian sejarah yakni domain peristiwa, domain struktur, dan domain strukturis. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturis yang mempelajari peristiwa dan struktur sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi artinya peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sedangkan struktur mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga kategori sumber data penelitian yaitu sumber tertulis, sumber lisan, sumber visual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang mengacu pada pendapat Kuntowijoyo (2013: 69) bahwa tata kerja Metode Sejarah terdiri dari: (1) Pemilihan Topik, (2) Pengumpulan Sumber, (3) Verifikasi Sumber, (4) Interpretasi Sumber Sintesis, (5) Historiografi.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Struktur Pemerintahan Kerajaan Wawonii

Struktur kerajaan Wawonii adalah Mokole\Lakino, Sara/adat, Kapala Kampo, Bonto, Kapita. Seorang Raja pada hakekatnya sebagai kepala pemerintahan dalam wilayah kekuasaannya atau dengan perkataan lain bahwa seorang raja sebagai pemegang tampuk kekuasaan amat terpengaruh terhadap masyarakat yang diperintahnya. Berdasarkan sumber tertulis dijelaskan bahwa Kerajaan Wawonii disebut *Boboni* dan *Wawoni*.

Mengenai asal mula kemunculan seorang pemimpin di Kerajaan Wawonii terdapat tradisi lisan yang diyakini oleh masyarakat di Pulau Wawonii hingga saat ini. Tradisi tersebut menceritakan bahwa "Kala itu saat masyarakat melakukan musyawarah untuk mencari seorang pemimpin, ternyata tidak ditemukan adanya kesepakatan tentang siapa pemimpin mereka, sampai akhirnya muncul seorang bayi yang kemunculannya bersamaan dengan tumbuhnya kelapa (nii) bercabang tujuh berwarna kuning keemasan, dan mengaku sebagai raja". Atas peristiwa itu muncullah nama pulau Wawonii. Wawonii berasal dari bahasa lokal yaitu *wawo* artinya atas dan *nii* berarti kelapa (Abdul Jalil Taslim, Wawancara 23 Juni 2018).

Selain struktur pemerintahan yang disebutkan di atas, wilayah Kerajaan Wawonii dibagi dalam tiga wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kapita, yaitu :

1. Wawonii bagian selatan dipimpin oleh Kapita Sumanga;
2. Wawonii bagian utara dipimpin oleh Kapita Tiwolu;
3. Wawonii bagian barat dipimpin oleh Kapita Bohohoa

Pada masa pemerintahan Lamboi, struktur pemerintahan kerajaan Wawonii disusun dan pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga struktur pemerintahan kerajaan Wawonii disusun kembali. Struktur tersebut berlaku hingga kerajaan Wawonii berubah status menjadi distrik.

2.2 Latar Belakang Pengangkatan Mbeoga sebagai Mokole

Sejarah pengangkatan Mbeoga sebagai Raja di Wawonii didasarkan pada adanya garis keturunan dari orang tuanya yang bernama Maulu. Maulu merupakan Mokole sebelumnya di Kerajaan Wawonii sehingga pengangkatan Mbeoga sebagai Mokole dikarenakan oleh garis keturunan tersebut. Pada umur 25 tahun Mbeoga sudah terjun dalam dunia politik dengan mengikuti perang bersama ayahnya Mokole Maulu dalam mempertahankan Benteng Lamendowua di Bobolio Wawonii Selatan. Benteng Lamendowua adalah salah satu Benteng pertahanan di Pulau Wawonii yang dijaga oleh tiga orang pengawal yang dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya.Sebagaimana diketahui bahwa pada abad ke-XV-XVI perairan Pulau Wawonii seringkali mendapat gangguan keamanan dari Bajak Laut Tobelo. Oleh karenanya, kerajaan-kerajaan yang berkembang pada saat itu membangun benteng sebagai pertahanan dan keamanan wilayah.

Sebagaimana dijelaskan informan bahwa "dalam perang di Benteng Lamendowua melawan Bajak Laut Tobelo, Mokole Maulu kemudian meninggal dunia dan mayatnya dikuburkan di Bobolio. Sepeninggal Mokole Maulu maka yang berhak menggantikan kedudukan Mokole Maulu adalah anaknya yang bernama Mbeoga. Pengangkatan tersebut dilakukan setelah melalui musyawarah dengan perangkat kerajaan di Wawonii (Abdul Fatah, Wawancara, 23 Maret 2018).

2.3 Perkembangan Kerajaan Wawonii pada masa Pemerintahan Mokole Mbeoga

Sebagai seorang Mokole di Kerajaan Wawonii, Mokole Mbeoga memegang peranan yang cukup vital baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga kehidupan masyarakat kerajaan Wawonii mengalami perkembangan baik dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan maupun sosial budaya. Mokole Mbeoga memerinthan dengan sangat rapi dalam membentuk suatu perekonomian kerajaan (Abdul

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Rauf, Wawancara, 15-4-2018). Adapun perkembangan kerajaan Wawonii pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga yakni sebagai berikut:

a. Perkembangan Politik dan Pemerintahan

Mokole Mbeoga melakukan perubahan besar terhadap tugas seorang Bonto mengenai masalah perdamaian, pertanian, perikanan, dan kesehatan. Seperti yang dijelaskan informan bahwa pembagian tugas tersebut nampak pada tugas yang diberikan kepada pembantu-pembantunya. Antara lain, dalam bidang perdukunan yang bertanggung jawab adalah orang Noko, yang mengatur atau mendistribusi air orang Rongo-rongo. Sang mokole juga membangun pos keamanan dan pos pantai di masing-masing kampung (Pirkan, Wawancara 23-03-2018).

b. Perkembangan Perekonomian

Untuk membangun perekonomian masyarakatnya, maka Mokole Mbeoga mengangkat seorang pengawal istana kerajaan yakni sebagai kepala perikanan yang mengatur masalah konsumsi raja. Pengawal tersebut bertujuan menyiapkan keperluan istana setiap hari. Pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga keadaan ekonomi aman, di mana mayoritas penduduknya adalah petani dengan mengembangkan pertanian tanaman padi, umbi-umbian dan palawija. Selain itu masyarakat Wawonii dianjurkan untuk menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa.Sebagaimana dikemukakan informan bahwa pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga kondisi ekonomi masyarakat mengalami kemajuan. Masyarakat dianjurkan untuk membuka lahan pertanian, baik dari sisi timur, selatan maupun barat. Tanaman pertanian yang dikembangkan yakni golongan tanaman jangka pendek seperti padi, jagung dan umbi-umbian, dan juga tanaman kelapa"(Muhamad Yamir, Wawancara,16-03-2018).

Di bidang perekonomian juga terjadi peningkatan akibat kemajuan sektor pertanian. Pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga, para bonto juga bertugas mengatur cara masyarakat Wawonii menanam. Karena kemajuan perekonomian masyarakat kerajaan Wawonii, maka banyak pedagang dari luar mengunjungi pulau Wawonii untuk membeli hasil-hasil pertanian dengan cara barter. Pedagang yang datang khususnya dari Sulawesi Selatan (orang Bugis). Sambil berdagang mereka juga menyebarkan agama Islam. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang Portugis juga datang membeli rempah-rempah di pulau Wawonii (Abdul Rauf,Wawancara 03 Maret 2018)

c. Perkembangan Sosial dan Budaya

Pada masa Pemerintahan Mokole Mbeoga, masyarakatnya masih hidup berkelompok-kelompok dan saling berjauhan. Jika terjadi peristiwa atau kedukaan, maka akan dibunyikan kentongan (tawa-tawa) untuk memberi tanda kepada rakyat di kerajaan Wawonii. Seperti dijelaskan informan "Pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga, jika ada tanda pukulan kentongan(tawa-tawa) terlalu cepat itu tandanya ada yang meninggal. Jika mokole/raja yang meninggal maka dibunyikan meriam dan itu tandanya jenazah sudah ada di pinggir kuburan (Abdul Fattah, Wawancara,13-03-2018).

Masa pemerintahan Mokole Mbeoga ditandai dengan beberapa adat dan budaya masyarakat Wawonii. Adapun adat tersebut terdiri atas: (1) Tarian Molihi (2) Kalapaeya (3) adat perkawinan (Tinasuka)

d. Perkembangan Agama Islam

Pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga, agama Islam mengalami perkembangan. Untuk mengembangkan ajaran agama Islam maka Mokole Mbeoga menerima utusan dari kesultanan Buton La Embo untuk mengajarkan agama Islam ke seluruh lapisan masyarakat di Kerajaan Wawonii. Agama Islam berkembang di Wawonii berkat peran para pedagang dari Sulawesi Selatan antara lain Guru Syidik dari Pare-Pare. Guru Syidik berperan penting dalam mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat antara lain mengucapkan dua kalimat syahadat, tata cara sholat, serta baca tulis Alquran. Perkembangan agama Islam kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh agama Islam di

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Pulau Wawonii seperti K.H.Muhammad Gazali dan K.H. Salahudin.Sebagai bukti kebesaran agama Islam di Pulau Wawonii masyarakatnya mayoritas beragama Islam hingga saat ini.

e. Perkembangan Pertahanan dan Keamanan

Pada masa Pemerintahan Mokole Mbeoga di Benteng Tangkombuno dibentuk pos pantai. Untuk menjaga dan mempertahankan wilayahnya, Mokole Mbeoga membangun beberapa pos pantai pertahanan yaitu:

1. Pos Kandapute yang terletak di pesisir Pantai Landianta di bawah pimpinan Sambora.
2. Pos Tapuna Popalia Aruhan Kanta (memelek) berkedudukan di Kampung Kampa yang dipertahankan oleh Panglima Perang Tiwolu.
3. Pos Lansepa di Dompo-dompo dipertahankan oleh Lasiompu.
4. Pos Baku-baku di kampung Baku-baku di bawah Komando Bobohoa.
5. Pos Pewalea Dimba di bawah penjagaan Latuan Pamana.

3. SIMPULAN

Berdasaarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur pemerintahan Kerajaan Wawonii sudah disusun rapi sejak masa pemerintahan Lakino Lamboi, dimana kedudukan Raja/Lakino dibantu oleh beberapa orang pejabat yang menjalankan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Raja.Struktur pemerintahan terdiri dari Lakino, Kapala Kampung, Kapita dan Bonto.Pada masa pemerintahan Mokole Mbeoga struktur pemerintahan diperbaharui yang terdiri dari Mokole, Tamalaki, Bonto, urusan rumah tangga, buruh dan kesejahteraan.
2. Mbeoga diangkat sebagai raja di Wawonii karena ia merupakan putra dari Mokole sebelumnya yakni Mokole Maulu. Saat ayahnya meninggal dalam peperangan melawan bajak laut Tobelo, maka secara otomatis Mbeoga diangkat untuk menggantikan ayahnya sebagai Mokole. Mbeoga dinobatkan sebagai Mokole di Benteng Lamendowua di Bobolio pada tahun 1650. Mbeoga mengangkat sumpah dalam agama Islam. Di antara sumpah Mokole Mbeoga terdapat kata “Bismillahi, Wallahi, Wabillahi, Wataullahi”.
3. Perkembangan kerajaan Wawonii pada masa Pemerintahan Mokole Mbeoga dapat dilihat dari keberhasilannya membawa Kerajaan Wawonii ke arah kemajuan. Perkembangan tersebut dapat dilihat di bidang politik dan pemerintahan, bidang perekonomian, perkembangan agama Islam, dan kemajuan di bidang sosial budaya.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

DAFTAR PUSTAKA.

Asma Dewi, Wa Ode. 2013. *Benteng Bombonawulu pada Masa Kesultanan Buton (1538- 1960).* Kendari: Skripsi Unhalu.

Arad, M. 2014. *Pelaksanaan Syariat Islam pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Idrus*. Skripsi UHO.

Hugiono. 1987. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara.

Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta LP3ES.

Koentjaraningrat.1983. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi Sejarah.*Yogyakarta: Tiara Wacana.

_____, 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu d dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lapian, A.B. 1987.*Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Yogyakarta: Disertasi, UGM.

Lamin Sarmint, 2002. *Pelaksanaan Syariat Islam pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824-1851).* Skripsi Unhalu.

Melamba, Basrin.dkk. 2017. *Sejarah Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara.*Yogyakarta: Istana Publishing.

Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta:Yayasan Danu.

Pamudji, 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta :*Bina Aksara.

R.Z Leirissa, (ed) dkk. 2006. *Pedoman Penulisan Sejarah Loka*l. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Rawiah, Sitti. *Tinjauan Tentang Fungsi Majelis Sarano Wuna dalam Pemerintahan Kerajaan Muna.* Skripsi, FKIP Unhalu, Kendari.

Saragih, Partogih, 1990. *Peran Kepemimpinan dan Daya Adaptasi terhadap Modernisasi.* Jakarta: Medya Asri.

Syahruddin, 2015. *Peranan Rakyat Lapandewa dalam Mempertahankan Kesultanana Buton dari Gangguan Bajak Laut Tobelo Pada Abad XVII* . Skrips Fkip Unhalu.